



Kekuasaan dan Peran Ganda Perempuan (Analisis Sosiologi Terhadap Perempuan Pembatik di Madiun)

Ika Silviana

UIN Sunan Ampel Surabaya

melisaretsi.A@rumahsosiologi.com

Abstrak: Hingga kini, kaum perempuan di negeri ini rentan mengalami diskriminasi dan eksploitasi. Konstruksi budaya menempatkan posisi perempuan sebagai pihak yang harus lemah-lembut, sopan-santun, dan patuh pada suami. Mereka tidak diperkenankan melangkahi laki-laki, karena akan dianggap sebagai perempuan yang tidak tahu diri. Dalam kultur masyarakat Jawa, perempuan diidentikan sebagai konco wingking dan tidak diperkenankan bekerja di sektor publik. Hal ini juga dialami oleh perempuan pembatik. Salah satu kasus yang dianalisis di tulisan ini adalah perempuan pembatik di home industry batik Retno Dumilah, Madiun. Mereka mengalami kontrol dari masyarakat untuk menjalankan peran ganda (double bourden): domestik dan publik. Akan tetapi, ditengah keterbatasan itu para perempuan pembatik tersebut terkadang mampu mencari celah agar diri mereka juga mendapatkan kekuasaan dari kelengahan laki-laki.

Kata Kunci: Patriarki, Peran Ganda, Kuasa, Perempuan Pembatik

Pendahuluan

Hingga kini, kondisi perempuan Indonesia masih dibayangi oleh kekuatan budaya patriarkhi. Budaya ini memposisikan perempuan sebagai obyek yang dibatasi secara ketat oleh norma sosial sehingga menstereotipkan perempuan sebagai individu yang lemah. Hal ini yang menyebabkan posisi perempuan selalu menjadi kaum yang subordinat. Masyarakat patriarki selalu menunjukkan bahwa hanya laki-laki yang berhak berada di ruang publik. Sedangkan perempuan hanya berhak beraktifitas di ruang privat (rumah). Sehingga, kebanyakan kaum perempuan tidak pernah memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan pengembangan dirinya.

Pendidikan kadangkala tanpa disadari turut berperan melanggengkan kultur patriarki. Di sekolah misalnya, budaya patriarki diwujudkan melalui materi ajarnya. Pada pelajaran SD seringkali menyebutkan kalimat “ibu

memasak di dapur” atau “ayah membaca koran di teras”. Kalimat-kalimat tersebut mengkotak-kotakkan posisi perempuan (ibu) dan laki-laki (ayah). Secara tidak langsung kalimat tersebut membangun ideologi bahwa wilayah gerak perempuan hanya terbatas dengan pekerjaan rumah. Sedangkan laki-laki memiliki kesempatan mengakses informasi dengan membaca koran.

Sebagian masyarakat juga membiasakan anak-anaknya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan stereotip gender yang berkembang di masyarakat. Anak perempuan diajari berbagai kegiatan atau kerja rumah tangga. Misalnya menyapu, membuat kopi, memasak, dsb. Orang tua biasanya membelikan anak-anaknya mainan yang menunjukkan gendernya. Anak perempuan dibelikan boneka, peralatan masak-masakan, dsb. Sedangkan anak laki-laki dibelikan mobil-mobilan, tembak-tembakan, dsb. Permainan tersebut menyimbolkan adanya sosialisasi tentang pemilihan ruang gerak antara anak laki-laki dan perempuan.

Tidak hanya pendidikan, kondisi kemiskinan juga menjadi akar munculnya ketidakadilan terhadap perempuan¹. Semakin mahal biaya pendidikan membuat masyarakat miskin semakin cermat untuk membuat prioritas. Termasuk prioritas untuk menyekolahkan anak. Masyarakat lebih sering mengutamakan pendidikan anak laki-laki daripada anak perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa anak laki-laki kelak akan berperan sebagai kepala keluarga. Sedangkan pendidikan anak perempuan dianggap tidak terlalu penting, karena perempuan nantinya akan ikut suami dan dibiayai oleh suaminya. Hal ini yang menyebabkan prioritas pendidikan bagi anak perempuan dibawah prioritas pendidikan anak laki-laki.

Selain tidak memiliki kesempatan bersekolah yang adil, perempuan juga sering dijadikan korban permasalahan ekonomi keluarga. Mereka yang tidak mampu menyekolahkan anak perempuannya, sering kali melibatkan anak perempuannya dalam proses produksi. Misalnya, pada masyarakat petani. Anak perempuan diikutkan dalam proses menggarap sawah. Bahkan, untuk mendukung proses produksi (untuk mengurangi mulut yang harus diberi makan ataupun menambah anak untuk pekerja produktif di sawah) seringkali anak perempuan dinikahkan pada usia dini. Ironisnya lagi, anak perempuan terkadang sering dikorbankan sebagai sarana membayar hutang keluarga. Ketidakadilan ini membuat perempuan semakin tidak memiliki *baragaining position*. Sehingga perempuan selalu mengalami diskriminasi.

¹ Julia Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 102

Dengan munculnya gelombang feminis yang menegakkan keadilan berbasis gender, maka diskriminasi terhadap perempuan mulai dikaji secara serius. Gender diasumsikan sebagai analisis perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan sebagai suatu hasil konstruksi sosial. Yaitu perbedaan yang didasarkan pada proses kultur yang panjang dan bukan bentukan secara nurtur (alamiah atau berasal dari kodrat Tuhan). Peran yang dikonstruksikan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan dikuatkan oleh kondisi fisik. Hal ini yang menyebabkan munculnya stereotip bahwa yang pantas menjadi pemimpin adalah laki-laki, karena laki-laki dianggap lebih kuat dan tegas. Sedangkan perempuan dianggap lebih emosional, sehingga perempuan dianggap tidak tepat sebagai pemimpin. Stereotip ini dipertegas oleh doktrin agama yang tidak memperbolehkan perempuan sebagai pemimpin.

Kini kehidupan perempuan mengalami perubahan. Keterpurukan perempuan yang selalu terbatas mulai di dobrak oleh kelompok feminis, khususnya feminis liberal dan Sosialis-Marxis. Diawali dengan perjuangan RA. Kartini dalam memperjuangkan pendidikan kaum perempuan. Sekarang perempuan memiliki kebebasannya dalam mengembangkan potensi dirinya. Misalnya saja perempuan pembatik di home industry batik Retno Dumilah, Madiun, yang telah menunjukkan eksistensinya melalui produksi seni batik. Bahkan perempuan pembatik memiliki nilai lebih (*surplus values*) sebagai pelestari kebudayaan bangsa. Namun, perempuan Indonesia masih harus mengikuti sistem patriarki yang masih melekat kuat di masyarakat. Sehingga eksistensi perempuan tetap memperoleh kontrol yang ketat dari lingkungan sosial-budaya sekitarnya.

Perempuan seringkali dianggap sebagai pekerja dalam rumah tangga yang perannya adalah mengurus urusan rumah tangga. Mereka dianggap inferior, hanya perannya ada dibelakang kaum laki-laki. Konstruksi budaya menempatkan posisi perempuan sebagai pihak yang harus lemah-lembut, sopan-santun dan patuh pada lelaki. Pada kultur masyarakat Jawa, perempuan diidentikan sebagai *konco wingking* dan tidak diperkenankan untuk bekerja di sektor publik. Urusan mencari nafkah adalah urusan laki-laki. Dunia kerja adalah dunianya laki-laki.

Jika perempuan harus memasuki dunia kerja karena alasan tertentu, maka mereka dituntut untuk bersikap rasional, tahan banting dan menekan sisi femininitasnya agar kinerja mereka lebih produktif. Mereka berani ambil resiko untuk terus produktif meskipun mendapatkan kendala biologis dan urusan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Tuntutan kerja yang semakin rasional, liberal, disiplin dan kompetitif akan menjadi semakin menguat apabila para perempuan bekerja di dalam sektor industri, seperti di

home industry. Karena dunia industri adalah dunia yang tidak mengenal waktu. Dunia industri adalah dunia kerja yang selalu produktif. Sehingga, kesalahan dan kelainan bekerja akan mengganggu sistem produksi itu sendiri². Bagaimana sistem pembagian kerja perempuan pembatik di home industry Retno Dumilah Madiun untuk menyeimbangkan peran di sektor domestik dan di sektor publik?

Sosiologi Pembangunan Berperspektif Gender

Mengkaji kehidupan masyarakat tidak pernah lepas dari kajian Sosiologi pembangunan. Dalam Sosiologi pembangunan, masyarakat diasumsikan sebagai objek yang direkayasa untuk mengikuti sistem pasar dan kebijakan penguasa yang berorientasi profit. Meskipun disadari juga bahwa pembangunan bisa menjadi sarana memperbaiki persoalan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat, asalkan pembangunan itu mampu dikelola dengan baik. Pembangunan yang diterapkan bertujuan untuk merubah tata kehidupan masyarakat yang awalnya terpuruk menjadi lebih baik. Dengan adanya pembangunan, maka diharapkan kehidupan masyarakat yang masih dipenuhi dengan kondisi kemiskinan, eksploitasi, kebodohan, marginalisasi, serta diskriminasi dapat dicarikan jalan keluar dan dipecahkan sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera, adil, cerdas, dan manusiawi.

Selama ini, pembangunan yang banyak dikaji lebih terfokus pada sektor pembangunan produksi dan moneter (uang). Pandangan fungsionalis dan sistem yang diwakili oleh Parson, Comte dan Rostow menekankan pada proses adaptasi dari masyarakat terhadap aktifitas industrialisasi dan modernisasi. Menciptakan pembangunan yang mensejahterakan seharusnya juga memperhatikan keseimbangan kerja sistem sosial yang lainnya seperti keluarga, pendidikan, politik dan budaya. Asumsi dasar kalangan ini bahwa gangguan yang terjadi pada satu sistem menimbulkan gangguan pada sistem sosial lainnya secara keseluruhan. Sehingga, untuk mendukung pembangunan diperlukan pendidikan modern yang berbasis pada industrialisasi.

Namun, pembangunan yang ada hanya mengutamakan kepentingan laki-laki, dan kurang sensitif terhadap kepentingan perempuan. Karena itulah, muncul teori pembangunan kritis dan alternatif yang lebih memihak pada kepentingan perempuan. Menurut penganut aliran ini, pembangunan di masyarakat harus lebih mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan perempuan. Perempuan adalah pihak yang seringkali diabaikan. Perempuan

² Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

dianggap sebagai pelengkap laki-laki dalam dunia kerja. Aliran pembangunan berbasis gender ini cenderung dipakai kalangan feminis beraliran liberal, radikal, dan Marxis-Sosialis.

Aliran Liberal lebih menekankan pada sifat manusia yang diberikan anugrah berupa nalar (rasio dan pengetahuan) sehingga mereka memiliki peran untuk melakukan tuntutan keadilan, kesempatan dan perolehan hak hidup manusia. Mary Wollstonecraft, seorang feminis liberal pada abad ke-18 mengatakan bahwa sejak revolusi industri, banyak perempuan borjuis tidak lagi produktif, karena suami mereka kebanyakan pekerja profesional. Peran mereka adalah menjamu suami selepas kerja. Para istri harus memperhatikan penampilan tubuhnya, sehingga membuat suami bisa nyaman melepaskan kelalahan dengan istrinya setelah bekerja³. Kondisi ini yang membuat perempuan merasa kehilangan haknya untuk bekerja, melakukan aktifitas politik dan memperkaya tingkat pengetahuan. Karena itu, feminis liberal memberi panduan kepada perempuan agar terlepas dari ketidakadilan melalui upaya pendidikan dan perolehan hak ekonomi di luar rumah.

Feminis radikal masih mengadopsi prinsip pemikiran feminis liberal, tetapi fokus kajiannya lebih ke dimensi ideologis. Kalangan ini menganggap bahwa ketidakadilan terhadap perempuan karena adanya kultur patriarkhi yang lembaga utamanya adalah keluarga. Karena itu, adagium yang terkenal feminisme radikal adalah *sexual its politics*, yang didengungkan oleh Kate Millet. Firestone mengatakan bahwa sumber eksploitasi perempuan terletak pada struktur biologisnya. Menjadi keniscayaan bahwa ketika perempuan melakukan pernikahan, mereka secara otomatis berada dan telah masuk ke dalam sistem patriarkhi.⁴

Pandangan feminis liberal dan radikal di atas dikritik oleh Feminisme Marxis-Sosialis. Jika feminis liberal mengatakan bahwa manusia dianugrahi akal, maka feminis Marxis-Sosialis menganggap bahwa yang membuat kita menjadi manusia bukan karena akalnya melainkan hasil kerja untuk bertahan hidup. Feminis liberal menganggap bahwa lintasan sejarah dipengaruhi oleh liberalisasi pemikiran individu. Namun, feminis Marxis-Sosialis mengatakan bahwa bukan suatu kesadaran yang menentukan sejarah, melainkan eksistensi dan lingkungan sosial. Infrastruktur yang menentukan suprastruktur.⁵ Inti

³ Rosemarie Tong Putnam, *Feminist Thought*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hal. 18

⁴ *Ibid*, hal.

⁵ *Ibid*., hal. 141-142.

gerakan feminis marxis ini adalah emansipasi perempuan terhadap para pemilik modal dengan cara masuk ke dalam sistem dunia kerja publik dan menghancurkan sistem kapitalisme dari dalam. Bagi feminis marxis ini, akar penindasan yang utama bagi perempuan karena disebabkan adanya kepemilikan pribadi. Sistem kepemilikan pribadi yang ditransformasi oleh sistem kapitalisme ini merambah dalam rumah tangga. (Heroepoetri & Valentina, 2004:47).

Feminis sosialis menyanggah pandangan kalangan radikal dan marxis tersebut. Bagi kalangan ini, pembangunan yang tidak sensitif terhadap kepentingan dan kebutuhan perempuan dikarenakan sistem kapitalisme yang dikuatkan dengan sistem patriarki. Kapitalisme bukan semata produksi saja, melainkan juga telah melakukan konspirasi dengan masyarakat untuk terus mempertahankan sistem patriarki sehingga yang terjadi adalah dominasi terhadap perempuan. Masuknya perempuan pada sektor publik untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja tidak serta merta akan menciptakan sisi keadilan dan mempertinggi martabat perempuan. Karena, di dunia kerja pun sistem patriarki juga masih berjalan. Agar terjadi perubahan sosial yang mampu mengakomodasi kaum perempuan, maka yang diperlukan tidak hanya sekedar revolusi biologis seperti yang dikatakan kalangan radikal, atau pula masuk ke dalam sistem produksi kapitalisme sebagaimana dianjurkan kalangan feminis marxis. Namun, lebih dari itu yakni mengubah konstruksi pandangan masyarakat tentang persoalan seks, dan mengubah konsepsi kelas tidak hanya pada tataran proletar dan kapitalis, karena perempuan sendiri termasuk bagian dari kelas sosial itu sendiri. Sehingga, jalan keluar untuk menciptakan pembangunan yang sensitifitas gender diperlukan upaya untuk merubah konstruksi sosial tentang sistem patriarki dan menghapuskan kelas sosial agar memberikan kesempatan yang sama.⁶

Di sisi lain, berkembang juga aliran feminis posmodern. Kalangan feminis ini mengkritik pandangan feminisme marxis-sosialis. Mereka justru menganggap bahwa feminisme marxis-sosialis adalah “anak kandung” pencerahan.⁷ Feminisme posmodern ini mengungkapkan bahwa feminis gelombang kedua bertendensi ‘mentotalkan’ dan menguniversalkan budaya dan sejarah masyarakat.⁸ Padahal, Judith Bultler menegaskan identitas gender

⁶ Fakih, *Runtuhnya*, hal. 160-161

⁷ Halberg dalam Ann Brooks *Posfeminisme & Cultural Studies*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), hal. 44

⁸ (Fraser dalam *Ibid.*, hal. 45

ditentang dan didekonstruksi dalam konteks yang berbeda-beda.⁹ Spirit posmodern ini lebih banyak mengadopsi pemikiran Michel Foucault, sehingga feminisme posmodern ini melihat kekuasaan sebagai bagian dari penindasan perempuan ada di mana-mana dan dalam bentuk yang beragam. Kekuasaan bukanlah kepemilikan tunggal di tangan satu pihak, sehingga ia bisa melakukan kekuasaan terhadap orang lain secara total. Kekuasaan itu bukanlah mengarah ke bawah, tetapi juga menuju ke atas, layaknya pipa kapiler dan sirkulasi udara. (Foucault, 2002:124). Konsep tentang *ke-liyan-an* yang juga diadopsi dari Simone de Beauvoir dalam *The Second Sex* (2000). Menurutnya, menjadi 'sekunder' atau sang 'liyan' bukanlah cara terbaik untuk menjadi seorang manusia, perempuan. Namun, feminisme posmodern memodifikasi pemikiran Beauvoir sehingga menjadi '*liyan*' masih memungkinkan perempuan untuk mengambil manfaatnya agar bisa mengkritik kebudayaan dominan (patriarki dan kapitalisme). Itulah sebabnya, keliyanan juga merupakan cara ber-Ada, cara berpikir serta bertutur yang memungkinkan keterbukaan, keragaman, pluralitas dan perbedaan.¹⁰

Pembangunan sumber daya manusia persepektif feminis posmodern ini memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi kalangan yang menerima kodrat dan kultur sosial di ruang keluarga (private) dan dunia kerja (publik). Namun, perempuan jangan sampai terlena. Identitas perempuan yang telah dikokohkan oleh laki-laki dan masyarakat itu harus dimanfaatkan untuk membalik posisi perempuan dengan jalan yang lebih terselubung, halus dan elegan. Perempuan Jawa misalnya, dianggap sebagai perempuan yang masih mempertahankan sifat feminitasnya. Sehingga, sebagai perempuan yang sopan, halus, lemah lembut dan patuh dengan laki-laki justru dapat membantu peningkatan derajat perempuan, baik itu di dunia kerja ataupun keluarga. Menjadi feminim dan ikut mengadopsi kultur patriarki bukanlah hal memalukan, melainkan bagian dari strategi mereka untuk menciptakan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan perempuan itu sendiri.¹¹

Metode Penelitian

⁹ *Ibid.*, hal. 50.

¹⁰ Tong, *Feminist.*, hal. 286

¹¹ Christina S. Handayani, dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa* (Yogyakarta: LKiS, 2004)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada kehidupan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang lain.¹² Informasi yang dikumpulkan lebih banyak berkaitan dengan realitas internal yang terletak dalam diri manusia (pendapat, keyakinan, dan nilai) dan dirumuskan secara interpretatif subyektif. Maka peneliti kualitatif harus terjun sendiri sebagai instrumen dan sekaligus pengumpul data.¹³

Penelitian ini akan difokuskan pada metode kualitatif yang bersifat fenomenologis, yakni berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. Peneliti berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa kehidupannya sehari-harinya.¹⁴ Tujuan fenomenologi adalah untuk dapat menggambarkan pembagian peran kaum perempuan pembatik di home industry batik Retno Dumilah. Dalam hal ini subjek ditempatkan sebagai individu yang bebas dan kreatif dalam mengkontruksi dunianya. Khususnya dalam strategi dan kemampuan mereka mensiasati dunia kerjanya dan urusan rumah tangganya.

1. Kriteria Informan dan Penetapan Lokasi Penelitian

a. Kriteria Informan

Berdasarkan tujuan penelitian maka subyek penelitian adalah perempuan pembatik yang bekerja di home industry batik Retno Dumilah. Yaitu pemilik home industry batik Retno Dumilah dan anak-anak perempuannya yang ikut bekekrja sebagai pembatik.

b. Penetapan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah home industry batik Retno Dumilah Madiun. Terletak di jalan Tuntang No.30 kelurahan Pandean Kecamatan Taman Madiun. Home industry ini merupakan satunya-satunya industri

¹² Lexy Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)

¹³ Roslan, *Penelitian Kualitatif dan Komunikasi*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hal. 113

¹⁴ Burhan Bungin, *Ragam Penelitian dan Analisis Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000)

batik yang eksis di kota Madiun. Sehingga menjadi wadah para perempuan pembatik Madiun untuk berkarya.

2. Tahap-Tahap Penelitian

- a. Tahap Pra Lapangan, yaitu suatu tahap persiapan yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke dalam kegiatan-kegiatan penelitian tersebut.
- b. Tahap Kegiatan Lapangan, yaitu suatu tahapan dimana peneliti memegang peranan aktif karena kemampuan peneliti dalam mengumpulkan data sangat diperlukan. Tahap ini melakukan proses observasi dan wawancara.
- c. Tahap Analisis Data, yaitu peneliti mengatur dan mengorganisasikan data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Peneliti mulai menelaah seluruh data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian diklasifikasikan dan dianalisis sesuai fokus kasus yang ada. Pada analisis ini peneliti menerapkan analisis komparatif konstan yang menggunakan logika induktif. Teknik analisis komparatif konstan merupakan teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian yang terjadi saat peneliti menganalisis kejadian dan dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian dilakukan.¹⁵

Selayang Pandang Home Industri Batik Retno Dumilah

1. Karakteristik Perempuan Pembatik Retno Dumilah

Kebanyakan para pembatik di Retno Dumilah adalah anak-anak dari pemilik home industry tersebut. Pemilik home industry batik Retno Dumilah adalah Siti Qomariyah yang kemudian menjadi figur utama bagi para anak perempuannya melestarikan budaya batik produksinya. Berawal dari kehidupannya di kota Ngawi, Siti dibekali keterampilan membatik. Kemudian di turunkan kepada ketujuh anak perempuannya. Sehingga, seluruh anak perempuannya mampu memberikan kontribusi pada home industry batik Retno Dumilah yang didirikan di Madiun. Siti selalu mengajarkan kemandirian pada setiap anggota keluarga. Sehingga, anak-anaknya sebagai perempuan pembatik di home industrinya tersebut memiliki keteguhan dalam mengelola usaha batik.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 100.

Selain pembekalan keterampilan membatik, anak-anak Siti juga dibekali berbagai keterampilan lain. Seperti memasak dan mengurus keluarga. Walaupun perempuan memiliki eksistensinya di sektor publik, perempuan tetap memiliki kewajibannya untuk mengurus keluarga. Bagi Siti kewajiban perempuan mengurus keluarga adalah kodrat yang tidak bisa dihindari. Kemampuan perempuan sebagai pengusaha batik harus dimaknai sebagai peran yang dilaksanakan untuk memperoleh manfaat di dunia. Namun, untuk menjadi ibu rumah tangga merupakan kewajiban yang manfaatnya dunia-akhirat. Pendidikan yang selalu ditanamkan kepada kesadaran anak perempuannya bahwa perempuan yang sempurna adalah perempuan yang mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga sekaligus. Pekerjaan perempuan di sektor publik hanyalah penyokong tambahan ekonomi keluarga. Peran inilah yang dianggap Siti sebagai nilai lebih dari menjadi istri dan ibu rumah tangga yang taat.

Siti lebih suka jika anak-anak perempuannya hanya fokus pada kewajibannya sebagai istri dan ibu rumahtangga. Namun, anak-anak perempuan Siti memiliki pemikiran yang radikal. Selain menjadi istri dan ibu rumah tangga, anak-anak perempuan Siti juga memiliki pekerjaan sebagai guru. Pekerjaan membatik dan guru adalah pekerjaan yang menunjang eksistensinya untuk berhubungan sosial dengan orang lain. Hal ini juga bisa bermanfaat bagi kemajuan usaha batiknya. Karena semakin banyak berinteraksi dengan orang lain, maka semakin banyak pula kesempatan untuk memperkenalkan usaha batiknya. Sedangkan, menjadi istri dan ibu rumah tangga tetap menjadi pekerjaan pokok yang harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan akidah agama (Islam) yang diyakini.

2. Pembagian Kerja Perempuan Pembatik Retno Dumilah

Sistem pembagian kerja di home industry batik Retno Dumilah masih didasarkan pada sektor domestik dan kerja di sektor publik. Kerja di sektor domestik adalah ibu rumah tangga yang mengurus keperluan suami dan anak-anak, serta mengurus keperluan dan kenyamanan rumah. Pekerjaan ini menjadi pekerjaan utama. Bahkan, perempuan pembatik di home industry batik Retno Dumilah rela meninggalkan aktivitas bisnis ketika pekerjaan rumah tangganya harus mereka jalankan.

Sedangkan, pekerjaan di sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu menjadi pembatik dan menjadi guru. Semua anak perempuan Siti bekerja sebagai guru, yaitu guru SD, SLB, TK dan pendidikan anak penderita autis. Pekerjaan sebagai pembatik, hanya dilakukan pada bidang-bidang dalam kategori ringan dan memerlukan ketelatenan. Misalnya, membuat pola batik, membatik, merebus, mencuci dan kegiatan-kegiatan yang mengandung konstruksi feminis. Sementara, pekerjaan pada bagian yang lebih keras, seperti mengangkat bahan baku, membatik printing, dan membatik cap hanya

dilaksanakan oleh anggota keluarga laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian kerja masih didasarkan pada budaya patriarki.

Meski pembagian kerjanya masih mengikuti budaya patriarki, perempuan pembatik di home industry batik Retno Dumilah juga dididik untuk mandiri dan melakukan pekerjaan laki-laki. Perempuan pembatik itu tidak menutup diri mempelajari pekerjaan yang bersifat maskulinitas, baik dalam urusan rumah tangga atau usaha. Ini dikarenakan banyaknya anggota keluarga perempuan, maka tenaga perempuan tersebut harus mampu mengimbangi peran anggota keluarga laki-laki. Sehingga, ketika tenaga mereka diperlukan untuk pekerjaan laki-laki seperti mengangkat bahan baku batik dan memperbaiki atap rumah, peran mereka juga sudah bisa diandalkan.

Pembahasan: Perempuan Pembatik Di Persimpangan Jalan

Pembangunan seringkali berpotensi menciptakan marjinalisasi bagi kaum perempuan. Misalnya, revolusi hijau.¹⁶ Revolusi hijau ini telah menyingkirkan perempuan dari pekerjaannya sebagai petani. Peran perempuan dalam usaha pertanian telah dibatasi oleh keberadaan teknologi. Perempuan yang dulu mengerjakan *ani-ani*, kini telah digantikan laki-laki. Akibatnya, perempuan dikembalikan lagi pada perannya di sektor domestik dan kehilangan kesempatan memperoleh nilai ekonomi secara mandiri. Selain itu, pelatihan tentang pertanian sering kali hanya melibatkan laki-laki. Hal ini adalah bentuk pembatasan akumulasi pengetahuan bagi kaum perempuan. Pembatasan ini berdampak pada perbedaan jenis pekerjaan perempuan sehingga juga berdampak pada perbedaan upah yang diperolehnya. Laki-laki yang dilibatkan dalam pertanian akan memperoleh upah dari hasil kerjanya di sawah. Sementara itu, perempuan yang tidak lagi dilibatkan dalam aktivitas produksi hanya memperoleh uang dari pemberian suami. Sehingga, semakin memperkuat kontrol laki-laki terhadap perempuan.

Rendahnya posisi tawar perempuan tersebut disebabkan rendahnya kualitas SDM. Maka, terjadilah diskriminasi satu kelompok oleh kelompok lainnya. Salah satu cara untuk memperbaiki kualitas SDM adalah melalui pendidikan. Dengan mendapatkan pendidikan yang layak dan humanis, maka akan mengikis ketidakadilan gender. Model pendidikan yang layak tersebut adalah pendidikan inklusif. Model pendidikan ini adalah model pendidikan yang membuat semua peserta didik dapat belajar dan berpartisipasi secara

¹⁶ Mansour Fakih, *Transformasi Sosial dan Analisis Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 73

efektif dalam sekolah tanpa ada diskriminasi.¹⁷ Sehingga pendidikan ini tidak dibatasi oleh perbedaan agama, budaya, etnis, gender, politik maupun ekonomi. Segregasi gender yang ada tentu bukanlah menjadi alasan bagi setiap lembaga pendidikan mana pun untuk melegalkan kondisi diskriminasi terhadap kelompok-kelompok marjinal seperti kaum perempuan. Perbedaan tersebut harus lebih dimaknai sebagai keanekaragaman yang dapat memberikan pengetahuan dan interaksi sosial yang memperkaya kehidupan.

Pendidikan gender juga menjadi prioritas dalam model pendidikan inklusif. Setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan. Kurikulum yang ditawarkan tidak lagi dikotak-kotakan berdasarkan konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan kesetaraan tersebut, setiap anak memiliki kebebasan guna memilih konsentrasi pendidikan yang diinginkan. Selain itu, perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Dengan memperoleh pendidikan yang humanis, maka akan membangun kesadaran kritis kaum perempuan. Sehingga, perempuan akan memiliki kesamaan, martabat dan kebebasan beraktualisasi untuk mengontrol dirinya sendiri secara mandiri, baik di sektor domestik dan di sektor publik.

Proses pembangunan sering kali menimbulkan persoalan bagi kaum perempuan karena menghasilkan kebijakan yang bias gender, berpihak pada kepentingan laki-laki. Penyerapan tenaga kerja dan penguasaan teknologi lebih banyak ditujukan pada kaum laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai agen ekonomi produktif, memiliki semangat kerja, kuat, rasional, suka tantangan, cepat, taktis, dan ambisius dalam mengejar prestasi kerja.¹⁸ Hal ini berbeda dengan perempuan yang lambat dalam bekerja dan cenderung mengutamakan emosionalnya dalam menghadapi persoalan sosial. Apabila dikaitkan dengan faktor biologis, maka produktifitas kerja perempuan itu menjadi menurun. Padahal, pembangunan sumber daya manusia seharusnya manusia tidak mendikhotomikan antara laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, yang memiliki hak dan keinginan yang sama dalam pembangunan, manusia telah dilahirkan sederajat dalam menjalankan kehidupannya.¹⁹

Tetapi, kehidupan masyarakat kita masih saja melegitimasi kultur patriarki, sehingga menjadi batu sandungan tersendiri bagi perempuan ketika

¹⁷ M. Agus. Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis*, (Yogyakarta: Resist Book, 2008), hal. 75

¹⁸ Judi Wacjman, *Feminisme versus Teknologi*, (Yogyakarta: SBPY Press, 2001)

¹⁹ Julia Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 13.

bekerja di sektor publik. Pada umumnya, perempuan di negeri kita dianggap sebagai pelengkap suami. Mereka hanya memiliki peran di *Sumur, dapur dan kasur*. Bahkan, ada anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa setinggi-tingginya perempuan menempuh pendidikan, pada akhirnya akan ke dapur juga. Tekanan ini semakin keras dan tajam apabila dikaitkan dengan kodrat perempuan yang harus melahirkan, menyusui, dan mendidik anak-anaknya. Gerakan emansipasi wanita yang mendorong perempuan untuk produktif di luar rumah membuat kehidupan perempuan menjadi semakin kompleks dan rumit.

Perempuan kita lantas harus memikul peran ganda (*double borden*): bekerja secara profesional dan mengurus urusan rumah tangga.²⁰ Di sisi yang lain, seringkali perempuan tidak bisa merubah dirinya menjadi lebih maskulin (seperti halnya kaum laki-laki) karena akar budaya feminisme dalam diri mereka sudah sekian lama terbentuk melalui pendidikan orang tua dan masyarakat sekitarnya. Sisi femininitas mereka acap kali tampil ketika menjalankan perannya sebagai karyawan dan pekerja profesional. Padahal, telah sekian lama dunia kerja terkonstruksi sebagai dunia kalangan laki-laki atau dunia maskulinitas. Sehingga, perempuan yang hendak bersaing di dunia kerja dituntut untuk menjadi maskulin.

Dalam penguasaan teknologi di dunia industri, laki-laki cenderung lebih dominan. Hadirnya mesin industri, dan komputerisasi di perkantoran lebih banyak menguntungkan kaum laki-laki karena mereka inilah yang bisa dengan cepat menjalankan sistem teknologi ini.²¹ Meskipun perempuan bisa menjalankan dan mengoperasikan teknologi, namun mereka tidak diberi ruang yang maksimal karena masih dianggap kurang terampil. Hal ini disebabkan teknologi adalah produk yang rasional, dengan demikian hanya orang-orang yang paling rasional yang berhak mengoperasikannya. Para perempuan lantas berada di persimpangan jalan. Mengikuti dinamika kerja dunia laki-laki yang rasional dan mudah beradaptasi dengan teknologi dan industri, ataukah tetap mempertahankan femininitasnya karena dianggap memiliki kekuatan tersendiri bagi kalangan perempuan di saat bekerja ?.

Persoalan tersebut juga dialami oleh perempuan pembatik di home industry batik Retno Dumlilah. Para pembatik masih mengalami pembatasan eksistensinya dengan terus memelihara budaya patriarki secara kuat. Para perempuan pembatik itu memiliki batasan dalam rangka mengembangkan prestasi dirinya. Peran sebagai perempuan yang memsuki dunia pernikahan,

²⁰ Fakih, *Analisis*.

²¹ Wacjman, *Feminisme*.

menjadikan perempuan pembatik juga harus beradaptasi dengan kultur yang patriarkis.

Kondisi patriarki di home industry batik Retno Dumilah itu juga dapat membatasi eksistensi para perempuan di lingkungan sosial, khususnya dalam melaksanakan kegiatannya di bidang industri. Karena mereka harus rela mendahulukan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan usaha. Jika urusan usaha diutamakan dibandingkan urusan keluarga, maka mereka akan mendapatkan sanksi sosial berupa teguran dari orang tuanya. Sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi spirit kerja industri, termasuk home industri Retno Dumilah menjadi faktor lainnya yang turut melanggengkan budaya patriarki. Perempuan pembatik Retno Dumilah juga mengabaikan otentisitas dalam proses interaksi sosial yang bebas kepentingan ekonomis. Karena idealnya, interaksi sosial dilakukan demi menjaga empati dan solidaritas sosial yang penuh keguyuban. Dengan masuk ideologi kapitalisme dan mengikuti logika industri, maka perempuan pembatik tersebut mengubah interaksi sosial sebagai modal ekonomis yang dimanfaatkan demi kepentingan profit semata.

Pola pendidikan perempuan pembatik Retno Dumilah yang menuntut mereka untuk bisa melakukan berbagai pekerjaan laki-laki, baik itu urusan rumah tangga ataupun usaha, sepiantas memang dapat dianggap memberikan posisi tawar dan kekuasaan bagi kaum perempuan di mata laki-laki. Menurut feminis posmodern, menjadi perempuan yang “liyan” harus dirayakan karena dapat memberi manfaat bagi kekuasaan mereka tanpa terlihat dan dirasakan “musuh dalam selimutnya” (laki-laki).²² Namun, dalam kasus perempuan pembatik Retno Dumilah ternyata menjadi “sang Liyan” semakin memperkuat posisi kaum laki-laki, karena kerja wajib mereka banyak diambil alih oleh kaum perempuan, sehingga laki-laki memiliki banyak waktu untuk bersantai dan melakukan aktifitas waktu luang yang lebih bermanfaat baginya seperti membaca koran, bersosialisasi, dan menyaksikan televisi. Ini bagaikan tradisi kerajaan, dimana sang raja lebih banyak menyaksikan kerja keras para bawahannya, sementara itu dirinya menikmati kesenangan hidup dan mengisi waktu luang dengan memperdalam seni, filsafat dan agama. Akan tetapi, bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan perempuan pembatik Retno Dumilah itu adalah kekuatan halus dan tidak disadari oleh kaum laki-laki. Dengan terlibat dan mengambil pekerjaan laki-laki, akan membuat laki-laki lambat laun akan menghilangkan kekuatannya di bidang pekerjaan tersebut. Bahkan, bisa juga

²² Simond Beauvoir, *The Second Sex*, (Yogyakarta: Bentang, 2000)

akan melemahkan diri dan tubuh mereka karena tubuh mereka tidak banyak beraktifitas, sehingga peredaran darahnya tidak lancar.

Kesimpulan: Mencari Kekuasaan Dibalik Keterbatasan

Karakteristik perempuan Indonesia dapat didentikkan dengan karakteristik perempuan Jawa, yaitu memiliki kepribadian yang sangat menarik dibandingkan dengan perempuan Indonesia lainnya. Perempuan Jawa memiliki karakteristik seperti bertutur kata halus, tenang, diam/ kalem, tidak suka berkonflik, mementingkan harmoni, menjunjung tinggi nilai keluarga, mampu memahami orang lain, sopan, pengendalian diri tinggi/terkontrol, daya tahan terhadap persoalan, memegang peranan secara ekonomi dan setia/loyalitas tinggi.²³ Karakteristik perempuan tersebut dianggap bermanfaat bagi masyarakat, dan pihak perempuan yang memiliki karakter itu tidak dapat mengembangkan dirinya untuk sejajar dengan laki-laki. Stigma tersebut justru terbantah oleh perempuan pembatik di home industry batik Retno Dumilah.

Harus diakui bahwa perempuan pembatik di home industry batik Retno Dumilah itu mampu melaksanakan pembagian kerja secara domestik maupun publik, walaupun berada di bawah tekanan budaya patriarki dalam lingkungan keluarganya. Pemberdayaan (*empowerment*) perempuan sangat diperlukan untuk mengubah arah dan sifat dari kekuatan struktural kekuasaan di berbagai level kehidupan. Perempuan dapat memilih bidang kehidupan mana sajakah yang dapat dikembangkan oleh perempuan dengan modal yang dimilikinya terbatas dan dibatasi. Pemberdayaan para perempuan (khususnya perempuan Jawa) tidak perlu melakukan perubahan dengan mengubah secara keseluruhan sifat tradisional perempuan Indonesia agar menjadi perempuan berkepribadian yang modern. Meski perempuan pembatik tersebut berada di bawah kekuatan patriarki, tapi kesempatan untuk bekerja di sektor publik dan mensejajarkan dirinya di bidang kerja laki-laki dapat dibaca sebagai simbol kekuasaan yang sirkular karena perempuan dengan kondisi feminitasnya masih bisa mencari celah untuk mengaktualisasikan diri dan kehidupannya.

Agar perempuan pembatik tersebut mampu mengembangkan diri di tengah kekuatan patriarki, maka revolusioner dalam dirinya harus diasah. Menurut Huntington 1979²⁴ proses revolusioner bisa dicapai dengan cara beradaptasi tanpa meninggalkan tradisi, kompleks (melalui banyak cara dan strategi), sistematis (mampu mempengaruhi semua pihak), bertahap (melalui langkah-langkah taktis), hegemonisasi (*convergence*) dan progresif. Proses-proses tersebut akan mengantarkan perempuan pada posisi yang lebih baik. Hal ini juga dapat ditunjang dengan pendidikan yang tinggi serta kecerdasan

²³ Handayani dan Novianto, *Kuasa Wanita*, hal. 130

²⁴ Dalam Fakih, *Analisis*, hal. 32

emosional yang baik. Kecerdasan emosional dapat terbentuk dari karakteristik yang telah dikonstruksi oleh lingkungan sekitar. Yakni, mengendalikan dirinya dan sabar menghadapi persoalan, tetapi jangan terlena dengan hegemoni yang ada. Apabila perempuan itu mampu mengelola kecerdasan emosional tersebut, maka akan memudahkan perempuan untuk melakukan pengembangan dirinya meskipun dalam kondisi pembagian kerja yang telah ditetapkan oleh lingkungannya.

Daftar Rujukan

- Brooks, Ann, 2005. *Posfeminisme & Cultural Studies*, Yogyakarta: Jalasutra
- Bungin, Burhan, 2000. *Ragam Penelitian dan Analisis Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press
- Beauvoir, Simond, 2000. *The Second Sex*, Yogyakarta: Bentang
- Diamond, Larry, 1998. *Konsolidasi Demokrasi*, Yogyakarta: IRE
- Fakih, Mansour, 2008. *Tranformasi Sosial dan Analisis Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____, 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Handayani, Christina S. dan Ardhian Novianto. 2004. *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LkiS
- Moleong, Lexy, 2000. *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Mosse, Julia, 2006. *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nuryatno, M. Agus. 2008. *Mahzab Pendidikan Kritis*. Yogyakarta: Resist Book.
- Roslan, 2006. *Penelitian Kualitatif dan Komunikasi*, Bandung: Rosdakarya
- Tong, Putnam, Rosemarie, 2004. *Feminist Thought*, Yogyakarta: Jalasutra
- Wacjman, Judi, 2001. *Feminisme versus Tekhnologi*, Yogyakarta: SBPY Press